



PENGUMUMAN

Nomor: 02/PANSEL-MADYA/II/2017

Tentang

PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA CALON PIMPINAN TINGGI MADYA PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Nomor: 01/PANSEL-MADYA/II/2017 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama Tahun 2017, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

selengkapnya silahkan klik link berikut ini : <http://www.kemenag.go.id> atau <http://seleksijpt.kemenag.go.id>



PENGUMUMAN
Nomor: 02/PANSEL-MADYA/II/2017
Tentang
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI TERBUKA
CALON PIMPINAN TINGGI MADYA
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan menindaklanjuti Surat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Nomor: 01/PANSEL-MADYA/II/2017 tentang Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya pada Kementerian Agama Tahun 2017, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara dan masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka dengan ketentuan, sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

- 1. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah:**

| No. | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1. | Inspektur Jenderal |
| 2. | Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah |
| 3. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam |
| 4. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen |
| 5. | Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha |
| 6. | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal |
| 7. | Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Keagamaan |
| 8. | Staf Ahli Bidang Manajemen Komunikasi dan Informasi |
| 9. | Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia |

2. Persyaratan Umum

- a. Pelamar dari PNS, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - 2) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat melamar.
 - 3) Kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar.
 - 4) Paling rendah berpangkat Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c (diutamakan pernah menduduki jabatan struktural eselon II pada Kementerian/Lembaga lainnya selama minimal 2 (dua) tahun).
 - 5) Memiliki Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - 6) Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik.
 - 7) Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan terakhir.
 - 8) Telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
 - 9) Tidak sedang dalam status tersangka/terdakwa/terpidana dan/atau menjalani sanksi/hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat.
 - 10) Menandatangani Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).
 - 11) Menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
 - 12) Sehat jasmani, rohani dan bebas Narkoba.
 - 13) Telah melunasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak perorangan tahun terakhir.
 - 14) Mengajukan surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp6.000,00 serta disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama dengan menyebutkan jenis jabatan yang dilamar.
- b. Pelamar dari TNI/POLRI, dengan persyaratan sebagai berikut:
- 1) Status TNI/POLRI aktif;
 - 2) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat melamar.
 - 3) Kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar.

- 4) Pangkat minimal Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda/Inspektur Jenderal Polisi;
- 5) Memiliki Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- 6) Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik.
- 7) Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan terakhir.
- 8) Telah mendapat persetujuan dari atasan langsung;
- 9) Tidak sedang dalam status tersangka/terdakwa/terpidana dan/atau menjalani sanksi/hukuman disiplin TNI/POLRI tingkat sedang atau berat;
- 10) Menandatangani Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).
- 11) Menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
- 12) Sehat jasmani, rohani dan bebas Narkoba.
- 13) Telah melunasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak perorangan tahun terakhir.
- 14) Mengajukan surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp.6.000,00 serta disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama dengan menyebutkan jenis jabatan yang dilamar.
- 15) Bersedia beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil, apabila diangkat sebagai JPT Madya;

c. Pelamar dari Non PNS/TNI/POLRI

- 1) Berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat melamar.
- 3) Kualifikasi pendidikan minimal strata satu (S1) sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar.
- 4) Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir;
- 5) Tidak sedang tersangkut kasus hukum baik pidana dan/atau perdata yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pengadilan;
- 6) Menandatangani Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).

- 7) Menandatangani Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
- 8) Sehat jasmani, rohani dan bebas Narkoba.
- 9) Memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan.
- 10) Telah melunasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak perorangan tahun terakhir.
- 11) Mengajukan surat lamaran ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp6.000,00 serta disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama dengan menyebutkan jenis jabatan yang dilamar.
- 12) Mendapatkan persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.

3. Tata Cara Pendaftaran

- a. Perpanjangan pendaftaran pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka pada Kementerian Agama dibuka mulai tanggal 28 Februari s.d. 3 Maret 2017 secara online melalui website Kementerian Agama: <http://www.kemenag.go.id> atau <http://seleksijpt.kemenag.go.id> dengan melampirkan kelengkapan persyaratan lamaran sebagai berikut:

- 1) Pelamar PNS:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) / Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
4. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan menyebutkan alasan memilih jabatan yang dilamar, dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp6.000,00.
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
6. Fotokopi ijazah terakhir.
7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik, atau sejenisnya.
8. Fotokopi laporan harta kekayaan terakhir.
9. Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).
10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku dari tingkat Kepolisian Resort (Polres).

11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin PNS tingkat sedang atau berat yang dibubuhi materai Rp6.000,00.
12. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik yang dibubuhi meterai Rp6.000,00.
13. Surat keterangan dokter dari RS. Pemerintah asli, terdiri atas:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
14. Fotokopi bukti pelunasan SPT Pajak perorangan tahun terakhir.
15. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna putih.
16. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai CPNS dan PNS sampai dengan pengangkatan dalam pangkat terakhir, atau sejenisnya.
17. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan struktural/ fungsional mulai dari SK Pengangkatan sebagai pejabat eselon IV sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
18. Surat pernyataan persetujuan atasan langsung

2) Pelamar TNI/POLRI:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA)
4. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan menyebutkan alasan memilih jabatan yang dilamar, dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp6.000,00.
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
6. Fotokopi ijazah terakhir.
7. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja TNI/POLRI 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik, atau sejenisnya.
8. Fotokopi laporan harta kekayaan terakhir.
9. Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).

10. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku dari tingkat Kepolisian Resort (Polres).
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dan/atau sanksi disiplin TNI/POLRI tingkat sedang atau berat yang dibubuhi materai Rp6.000,00.
12. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik yang dibubuhi meterai Rp6.000,00.
13. Surat Keterangan dokter dari RS. Pemerintah/TNI/POLRI asli, terdiri atas:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
14. Fotokopi bukti pelunasan SPT Pajak perorangan tahun terakhir.
15. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna putih.
16. Fotokopi SK Pengangkatan dalam pangkat terakhir.
17. Fotokopi SK Pengangkatan dalam jabatan struktural/ fungsional mulai dari SK Pengangkatan jabatan pertama sampai dengan pengangkatan dalam jabatan terakhir.
18. Surat pernyataan persetujuan atasan langsung.

3) Pelamar Non PNS/TNI/POLRI

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat lamaran yang ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia dengan menyebutkan alasan memilih jabatan yang dilamar, dan ditandatangani oleh Pelamar di atas materai Rp6.000,00.
4. Surat persetujuan dari Presiden Republik Indonesia.
5. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai dengan format terlampir.
6. Fotokopi ijazah terakhir.
7. Pakta Integritas (sesuai dengan format terlampir).
8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang masih berlaku dari tingkat Kepolisian Resort (Polres).

9. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman penjara/kurungan dari pengadilan yang dibubuhi materai Rp6.000,00.
 10. Surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik serta tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibubuhi materai Rp6.000,00.
 11. Surat Keterangan dokter dari RS. Pemerintah asli, terdiri atas:
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani;
 - Surat Keterangan Sehat Rohani;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba disertai dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
 12. Fotokopi bukti pelunasan SPT Pajak perorangan tahun terakhir.
 13. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang berwarna putih.
 14. Surat keterangan pengalaman kerja dari instansi/lembaga/badan hukum tempat yang bersangkutan bekerja;
- b. Setelah selesai pendaftaran secara *online*, pelamar wajib menyusun seluruh dokumen/berkas persyaratan administrasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas dan dijilid dengan rapih dalam 1 (satu) amplop tertutup dan disampaikan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama serta harus sudah diterima oleh panitia **paling lambat tanggal 3 Maret 2017 pukul 16.00 WIB** dengan alamat:

PANITIA SELEKSI TERBUKA
JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA KEMENTERIAN AGAMA
d.a. BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA
JL. LAPANGAN BANTENG BARAT NO. 3 – 4 JAKARTA

B. TAHAPAN SELEKSI

| No. | Kegiatan | Tanggal |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | Perpanjangan pengumuman | 28 Februari s.d. 3 Maret 2017 |
| 2. | Perpanjangan pendaftaran <i>online</i> | 28 Februari s.d. 3 Maret 2017 |
| 3. | Perpanjangan penyampaian berkas persyaratan administrasi | 28 Februari s.d. 3 Maret 2017 |
| 4. | Seleksi administrasi | 28 Februari s.d. 6 Maret 2017 |
| 5. | Pengumuman hasil seleksi administrasi | 7 Maret 2017 |
| 6. | Penulisan Makalah (judul ditentukan Pansel) | 13 Maret 2017 |
| 7. | Pelaksanaan seleksi kompetensi | 14 s.d. 16 Maret 2017 |
| 8. | Wawancara | 15 s.d. 17 Maret 2017 |
| 9. | Pengumuman hasil seleksi | 24 Maret 2017 |

Catatan : *Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada Peserta melalui website dan/atau email.*

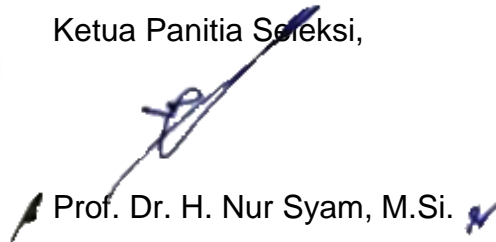
C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi pelamar yang akan diproses oleh Panitia adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Seluruh dokumen/berkas administrasi pelamar yang sudah diserahkan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama menjadi hak milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
3. Dalam seleksi terbuka ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apa pun.
4. Seluruh pengeluaran biaya baik transport, akomodasi, konsumsi, kelengkapan administrasi, maupun biaya pribadi sepenuhnya ditanggung oleh Pelamar.
5. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama bersifat final dan mutlak tidak dapat diganggu gugat.
6. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Pelamar memberikan data atau keterangan tidak benar/palsu, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Agama berhak membatalkan.

Jakarta,

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama
selaku

Ketua Panitia Seleksi,



Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.